

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Rp 12 M

UNGARAN - Samsat Kabupaten Semarang mempertegas aturan bahwa kendaraan yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati dan tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut akan diblokir.

Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Semarang Noor Hadi mengatakan hal tersebut mengacu kepada peraturan Kapolri Nomor 5/2012. "Bahwa kendaraan yang STNKnya sudah mati tidak melakukan pembayaran selama 2 tahun kendaraan itu akan dihapus dari daftar kendaraan. Sehingga dia tidak bisa

membayar pajak lagi," ujar Noor Hadi, Selasa (9/10).

Hal tersebut juga akan berdampak kepada legalitas kendaraan itu sendiri. "Kalau menurut aturan Kapolri tersebut, kendaraan yang sudah diblokir surat-suratnya tidak bisa dihidupkan lagi," katanya.

Dijelaskan Noor Hadi, pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Semarang cukup tinggi. "Pertahun pertumbuhan kendaraan bermotor baru mencapai 35 ribu. Jika dirata-rata pertumbuhan setiap bulan 3 ribuan kendaraan baru," katanya.

Dari kendaraan-kendaraan yang baru tersebut, juga masih

ada yang enggan membayar pajak. Dikatakannya, di 2018 ini saja terhitung tunggakan pajak dari kendaraan yang belum masuk ke UPPD mencapai Rp 12 miliar. "Kalau tidak diatasi dengan upaya maka tunggakan semakin besar. Karenanya kita memberikan pelayanan yang mudah," ujarnya.

Adapun upaya dilakukan diantaranya membuat beberapa titik outlet pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). "Di wilayah perbatasan sudah kita dirikan beberapa outlet," katanya.

Seperti halnya Kecamatan

Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Sumowono. Didirikannya outlet tersebut, lanjutnya, juga untuk mengejar realisasi target UPPD dari sektor PKB dan BBNKB. Terkait dengan target tersebut di 2018 ini untuk PKB yaitu sebesar Rp 124.880.450.000.

Untuk PKB di 2018 hingga Oktober 2018 sudah terealisasi Rp 108.823.781.000. Sementara target dari BBNKB 2018 sebesar Rp 100.354.040.000. Hingga Oktober 2018 ini sudah terealisasi Rp 89.641.391.000.

"Untuk PKB sudah terealisasi 87,14 persen dari target dan

BBNKB sudah terealisasi 89,33 persen dari target," katanya.

Pihak UPPD Kabupaten Semarang mengaku optimis jika di akhir 2018 nanti pendapatan sektor PKB dan BBNKB akan melebihi target. Tentunya untuk memuluskan langkah tersebut, sosialisasi dan metode jemput bola dilakukan.

Selain membuka outlet, upaya lain juga dilakukan. Diantaranya melakukan sosialisasi ke masyarakat, membuat samsat keliling, dan memberikan pelayanan saat hari libur seperti dalam kegiatan *car free day*. "Juga melalui program Samsat siaga dimana petugas dari kita mendatangi wajib

pajak (WP) yang memang benar-benar tidak bisa datang ke

kantor mapun outlet kami," katanya. (ewb/bas)